

Analisis Implementasi Kebijakan Perpres No 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Aroum Bidandari, Doddy Faisal Chumaini, Budiyanto Budiyanto, Mufarrikhul Hazin

Universitas Negeri Surabaya

Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, kota Surabaya, Jawa Timur

E-mail: 24010976007@mhs.unesa.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the Implementation of Presidential Regulation Number 68 of 2022 concerning the Revitalization of Vocational Education and Vocational Training in Indonesia. The method used in this study is the Systematic Literature Review (SLR) with a qualitative approach. The stages of this SLR include identifying, evaluating, and interpreting all available research, relevant to a particular research question, or topic area, or phenomenon of interest. all findings on a research topic to answer previously established research questions (Kitchenham & Charters, 2007). The results of the study indicate that the implementation of Presidential Regulation Number 68 of 2022 has been running well in the community. However, there are still challenges in several regions in the implementation of the policy, such as: 1) lack of coordination between related Ministries, Central and Regional Institutions, stakeholders and other institutions as implementers in strengthening collaboration with related parties that support cooperation between educational institutions and DUDIKA; 2) The formation and performance of the Vocational Regional Coordination Team (TKDV) are not yet optimal so that the implementation of the Presidential Regulation is not optimal; 3) limited resources ready to be employed due to several factors including parental approval that does not allow working away from home, 4) gaps between the Vocational Education curriculum and world needs; 5) lack of qualified and competent vocational educators and trainers; 6) lack of incentives for educators and trainers in certain areas; 7) limited facilities and infrastructure in several areas, resulting in the level of absorption of Vocational Education graduates not being maximized in several areas in Indonesia. Presidential Regulation Number 68 of 2022 is one of the government's steps forward to improve the quality of Indonesian human resources through Vocational Education and Vocational Training with mutually beneficial collaboration and partnerships between the World of Education and DUDIKA so as to produce quality graduates who are able to contribute to national development.

Keywords: Policy Implementation; Vocational Education; Vocational Training

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang ada di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literatur Review (SLR)* dengan pendekatan kualitatif. Adapun tahapan SLR ini diantaranya adalah dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia, relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu, atau area topik, atau fenomena yang menarik. seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya (Kitchenham&Charters, 2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022 sudah berjalan dengan baik di masyarakat. Akan tetapi masih terdapat tantangan di beberapa daerah dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti: 1) kurangnya koordinasi antar Kementerian terkait, Lembaga Pusat dan Daerah, stakeholder dan lembaga lain

sebagai pelaksana dalam memperkuat kolaborasi dengan pihak terkait yang mendukung kerjasama antara lembaga Pendidikan dengan DUDIKA; 2) Belum optimalnya pembentukan dan kinerja Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) sehingga implementasi Perpres belum maksimal; 3) keterbatasan sumber daya yang siap untuk dipekerjakan karena beberapa faktor diantaranya adalah restu dari orang tua yang tidak mengizinkan bekerja jauh dari rumah, 4) kesenjangan antar kurikulum Pendidikan Vokasi dengan kebutuhan dunia; 5) kurangnya tenaga pendidik dan pelatih vokasi yang berkualitas dan kompeten; 6) kurangnya intensif bagi tenaga pendidik dan pelatih pada daerah-daerah tertentu; 7) keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa daerah sehingga menyebabkan tingkat keterserapan lulusan Pendidikan Vokasi belum dapat maksimal di beberapa daerah di Indonesia. Perpres Nomor 68 Tahun 2022 merupakan salah satu langkah maju dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan adanya kolaborasi dan kemitraan yang saling menguntungkan antara Dunia Pendidikan dan DUDIKA sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Pendidikan Vokasi; Pelatihan Vokasi

Pendidikan vokasi merupakan salah satu bentuk pendidikan di Indonesia yang mengedepankan para peserta didiknya memiliki kualitas keahlian berdasarkan spesifikasi tertentu. Pendidikan vokasi di Indonesia meliputi pendidikan di tingkat menengah atau yang biasa disebut dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun pendidikan di tingkat Pendidikan Tinggi yakni PTN/PTS Vokasi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Program pendidikan di Tingkat menengah atau SMK meliputi program keahlian Teknik Kendaraan ringan Otomotif (TKRO), Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM), Akuntansi Keuangan dan Lembaga (AKL), tata boga, tata busana, tata rias, perhotelan dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi Vokasi meliputi Diploma: D1/Ahli Pratama, D2/Ahli Muda, D3/Ahli Madya dan D4/Sarjana Terapan yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1 yang ada pada Pendidikan Vokasi.

Pendidikan Vokasi merupakan salah satu bentuk Pendidikan di Indonesia yang senantiasa terus mengalami perkembangan terkait jumlah sekolahnya hingga perkembangan dalam program keahlian yang ada di SMK. Yang demikian tersebut dikarenakan adanya kemajuan yang terus terjadi pada Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja yang juga mengalami perkembangan dengan adanya kemajuan teknologi, era globalisasi serta era industri 4.0 yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan (Purnamawati, 2018) Pendidikan vokasi merupakan salah satu bentuk pendidikan di Indonesia yang terus berkembang, baik mengenai jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun mengenai program keahlian. Spesifikasi program keahlian disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, era globalisasi, dan era industri 4.0, dimana keahlian telah mengarah pada teknologi tingkat tinggi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan peningkatan yang pesat dari berbagai aspek kehidupan mengharuskan Pendidikan Vokasi mengambil peran dalam rangka

menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif dan memiliki kompetensi yang unggul dengan spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat luas utamanya DUDIKA. Adapun jalan terbaik yang harus ditempuh Pendidikan Vokasi seperti SMK dan Sekolah tinggi Vokasi adalah dengan menjalin kemitraan bersama dengan DUDIKA. Melalui kemitraan SMK bersama dengan DUDIKA SMK dapat meningkatkan kualitas lulusannya. Lulusan SMK diharapkan dapat menjadi sumber daya yang siap kerja karena pada pendidikan ini lebih mengedepankan ilmu praktik yang bisa langsung diterapkan di dunia kerja sehingga tidak buang-buang waktu untuk menguasai ilmu yang spesifik. Mahasiswa lulusan vokasi akan diberikan keterampilan khusus yang menjadi bekalnya di masa depan yaitu pengalaman kerja. Mereka juga akan menyandang gelar vokasi atau gelar ahli madya saat sudah selesai menyelesaikan studi. Vokasi memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas tenaga kerja di Era Global sehingga generasi muda saat ini harus dapat bersaing dan terus mengembangkan diri dan mampu menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA).

Kebutuhan DUDIKA akan tenaga kerja muda, cekatan, dan terampil sangatlah tinggi. Bukan hanya itu, dunia industri juga membutuhkan tenaga kerja dengan kecakapan kerja (*Hard Skill*) dan kemampuan berinteraksi dan berperilaku (*softskill*) yang baik, siap dengan perubahan, inovatif serta memiliki daya tahan tinggi. Semua itu dilakukan oleh DUDIKA karena berkaitan dengan produktifitas perusahaan yang diharapkan semakin baik dan semakin meningkat setiap periodenya. Kegiatan produksi pada DUDIKA saat ini pada umumnya menggunakan peralatan yang canggih dengan menggunakan kemajuan teknologi yang selalu berkembang. Untuk dapat menjalankan proses produksi pada DUDIKA maka sangat dibutuhkan SDM yang kompeten dan terlatih dalam menggunakan peralatan-peralatan yang serba canggih dan modern seperti yang ada di DUDIKA pada saat ini. Mengingat hal tersebut Dunia Usaha dan Dunia Industri bersedia untuk menjadi mitra dari SMK yang merupakan Pendidikan Vokasi.

Pilihan masuk sekolah Vokasi adalah langkah yang tepat untuk mempersiapkan masa depan di era global dan menuju Indonesia emas. Pendidikan vokasi berorientasi pada keahlian dan kepakaran yang khas serta berkemampuan untuk siap kerja. Dengan demikian, lulusan pendidikan vokasi mampu bersaing secara global karena fokus pada pengembangan keterampilan dan teknologi aplikatif. Program kemitraan SMK dengan DUDI dengan konsep 5C memberikan bekal keterampilan industri bagi siswa untuk mengenal lebih dekat proses kerja di dunia industri berdasarkan kebijakan dari sekolah, pemerintah, dan industri. Indikator pengalaman kerja secara konsep dan praktik telah diberikan di SMK setelah industri diterapkan dengan keterampilan kolaboratif di industri.

Industri merupakan mitra dari Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi utamanya SMK. Kolaborasi industri bersama dengan Pendidikan Vokasi utamanya SMK merupakan kerjasama yang

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yakni bagi Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia kerja (DUDIKA). Adapun tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk memastikan lulusan SMK memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga lebih mudah terserap oleh DUDIKA, melalui pengalaman kerja yang relevan; penyesuaian kurikulum yang ada di industri dengan SMK, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan yang terakhir adalah memperkuat keterkaitan antara SMK dengan DUDIKA dengan menciptakan sinergi yang berimbang pada meningkatnya jumlah keterserapan lulusan SMK pada DUDIKA. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari Kerjasama SMK dengan DUDIKA diantaranya adalah: 1) DUDIKA memperoleh SDM yang terlatih dan siap kerja sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan pelatihan bagi pekerjanya terutama pekerja lulusan SMK; 2) Adapun upah yang

Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan jika melanjutkan studi ke sekolah vokasi, di antaranya sebagai berikut: 1) Lebih banyak praktik: Kuliah reguler biasa mungkin lebih banyak memberikan tugas atau mata kuliah teori yang membosankan. Kalau anda tipe orang yang lebih suka aplikasi teori, bisa memilih pendidikan vokasi yang memiliki lebih banyak praktik. Pelatihan langsung yang real atau mendekati situasi nyata di dunia kerja membuat satu langkah lebih maju. Awal karir bisa ditentukan sejak masuk ke jurusan atau vokasi yang disukai. 2) Memiliki lebih banyak pilihan sekolah: Berbeda dengan kuliah reguler yang bisa menentukan lebih banyak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Adapun universitas atau perguruan tinggi yang membuka program vokasi, misalnya program D2 atau D3 jurusan tertentu. Selain itu, ada pula institusi yang membuka sekolah vokasi seperti kepolisian, keperawatan dan lain-lain. 3) Memiliki kesempatan karir yang sesuai minat. Bukan hanya bisa melanjutkan pendidikan di universitas atau perguruan tinggi yang membuka program vokasi, akan tetapi dapat langsung masuk ke institusi yang membuka program sama. Setidaknya memiliki kesempatan untuk menentukan karir dan masa depan sesuai minat. Dengan meminimalisir risiko salah masuk jurusan yang umum terjadi pada sebagian besar mahasiswa di Indonesia. Salah satu tujuan pendidikan adalah menciptakan calon pekerja yang memiliki keahlian lebih spesifik; 4) Program jurusan yang lebih beragam: Kelebihan sekolah vokasi adalah menawarkan jurusan yang lebih beragam. Pertimbangkan untuk memilih jurusan yang sesuai dengan *passion* diri selama ini maupun fokus belajar bahasa asing, agroindustri, teknik, teknologi jaringan, perhotelan, pariwisata, dan lain-lain.

Dengan mendaftar di sekolah vokasi berarti seseorang telah menentukan spesifikasi diri sendiri sejak masuk program vokasi. Profesionalisme yang tinggi menjadi keunggulan lulusan vokasi. Sehingga diharapkan lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi vokasi akan dapat mempunyai keahlian yang lebih dibandingkan lulusan dari sekolah non vokasi. Dengan demikian sekolah vokasi dapat dikatakan berhasil dalam mencetak SDM yang unggul yang setara dengan apa

yang dibutuhkan oleh DUDIKA dan diharapkan lulusannya akan terserap secara periodik dan berkelanjutan oleh DUDIKA. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha, pemerintah perlu melakukan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan menerbitkan Perpres Nomor 68 Tahun 2022. Adapun dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022. Perpres ini mencabut Keppres Nomor 68 Tahun 1998. Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bersumber dari: APBN; APBD; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpres ini mengatur mengenai revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang dilakukan dengan tujuan antara lain untuk: meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan membekali sumber daya manusia/tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwirausaha. Ruang lingkup Perpres ini meliputi: 1) kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja kompeten; 2) penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 3) penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 4) penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 5) koordinasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 6) peran Pemerintah Daerah; 7) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 8) pendanaan.

Beberapa penelitian yang terdahulu akan menjadi bagian dari objek penelitian pada *preliminary study* untuk di lakukan analisis terkait implementasi Perpres nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi diantaranya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Kajian Literatur Terdahulu (State of The Art)

No.	Jurnal Referensi		
	Nama Jurnal (Journal Name)	Jenis/Model Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siregar, I.A. Hartono, B. & Isnaini. (2023). Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 Tahun 2022 di Dinas Pendidikan Sumatera Utara. <i>Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)</i> . 5 (4): 2718 - 2731. DOI: 10.34007/jehss.v5i4.1666	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) sudah berjalan sesuai dengan teori yang ada meskipun masih ada kendala. Dari segi sumber daya, implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) sudah berjalan sesuai teori yang ada,

			<p>meskipun masih terdapat kendala. Dari sisi disposisi, implementasi Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) sudah berjalan sesuai teori meskipun masih terdapat kendala. Dari sisi struktur birokrasi, implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) sudah berjalan sesuai teori yang ada, meskipun masih terdapat kendala</p>
2.	<p>Irwanto, I. (2020). 'Model pembelajaran pendidikan vokasional yang efektif di era revolusi industri 4.0', <i>TAMAN VOKASI</i>, 8(1). Available at: https://doi.org/10.30738/jtv.v8i1.7265.</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Kejuruan efektif, yaitu: (1) sekolah telah menekankan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, menggunakan pembelajaran multimedia interaktif, strategi pembelajaran yang bervariasi. Pengelolaan kelas, bengkel dan laboratorium telah efektif karena telah digunakan dengan baik dalam implementasi, terutama praktik. Strategi pembelajaran yang biasanya digunakan adalah kooperatif, kontekstual, studi kasus, diskusi, pembelajaran realistik dan berbasis masalah. (2) Budaya yang ada di sekolah telah efektif dalam menerapkan pembelajaran teoritis dan praktis. Budaya kerja seperti di Dunia Industri telah dilakukan. Proyek di luar lembaga yang dilaksanakan oleh sekolah adalah guru dan siswa untuk menyelesaikan proyek. Budaya kerja positif Dunia Industri di sekolah akan menghasilkan pembelajaran teori dan praktis yang efektif dan lulusan yang berkualitas dan siap untuk bekerja di industri .</p>
3.	<p>Margareta Wahyu Dwi Utari.2024. Perencanaan kurikulum Penyeragaman Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan di Wilayah 1 Jakarta Pusat.Universitas Pendidikan Indonesia.repository.upi.edu.PPs upi,edu</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini memberikan implikasi positif untuk SMK lain dalam merancang kurikulum penyeragaman dengan mitra industri. Keberhasilan perencanaan strategi pembelajaran dan penilaian dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasional, menciptakan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja sesuai dengan tuntutan IDUKA.</p>

- | | | | |
|----|--|------------|--|
| 4. | <p>FAISAL, ANDI
FAHRI (2021) <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM
PENYELENGGARAAN
SEKOLAH VOKASI DI
KOTA MAKASSAR</i>. Thesis
thesis, Universitas
Hasanuddin.</p> | Kualitatif | <p>Hasil penelitian menunjukkan dalam penyelenggaraan collaborative governance untuk mengelola pendidikan vokasi di kota Makassar menggunakan pendekatan Ansell dan Gash, sudah dijalankan oleh stake holder namun ada beberapa bidang yang belum melibatkan masyarakat dalam menjalankan collaborative governance. Faktor pendukung collaborative governance dalam penyelenggaraan sekolah vokasi di kota Makassar adalah (1) Adanya Struktur Hierarki, (2) Adanya komitmen dalam menjalankan tugas (3) Adanya pengambilan keputusan bersama. Sementara pengambatnya ialah (1) Belum adanya desain kelembagaan/institusionalisasi yang khusus bekerja untuk kolaborasi dalam penyelenggaraan sekolah vokasi di kota Makassar. (2) Adanya culture Budaya acuh/apatis seluruh stake holders dalam kolaborasi untuk penyelenggaraan sekolah vokasi di kota Makassar. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan komparatif dalam collaborative governance dalam aspek pendidikan vokasi di Indonesia dan dunia internasional. affiliasi penulis</p> |
|----|--|------------|--|

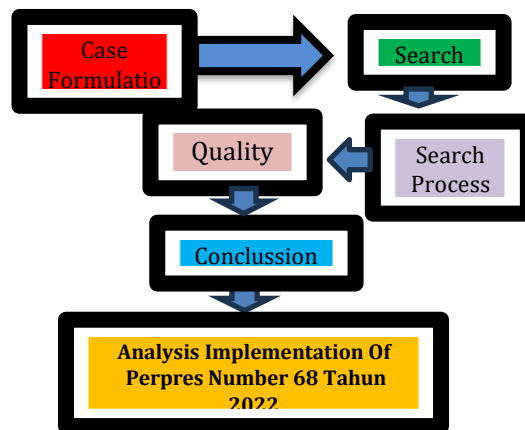
- | | | | |
|----|--|------------|--|
| 5. | <p>Purnamawati, et, al.(2018).
Developing a Partnership
Model of Vocational High
School with Business and
Industrial World based Core
Strategies.) Atlantis Press.
Advances in Social Science,
Education and Humanities
Research (ASSEHR), volume
227 1st international
Converence on Advance
Multidisciplinary Research
(ICAMR)</p> | Kualitatif | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres nomor 68 tahun 2022 sudah berjalan dengan baik di masyarakat. Akan tetapi di beberapa daerah adanya sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti kurangnya koordinasi antar Kementerian, lembaga pusat dan daerah, stakeholder dan lembaga sebagai pelaksana untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak terkait yang dapat mendukung peningkatan kerjasama antara lembaga Pendidikan dengan DUDIKA; Belum optimalnya pembentukan dan kineja Tim Koordinasi Daerah Vokasi keterbatasan sumber daya yang siap untuk dipekerjakan, kesenjangan antar kurikulum Pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja; kurangnya tenaga pendidik dan pelatih vokasi yang berkualitas dan kompeten; kurangnya intensif bagi tenaga pendidik dan pelatih serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa daerah sehingga menyebabkan tingkat keterserapan lulusan Pendidikan Vokasi belum dapat maksimal di beberapa daerah di Indonesia. Disamping itu penelitian ini menyarankan perlunya penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga, peningkatan kualitas pendanaan, serta pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan pasar kerja.</p> |
| 6. | <p>Avana, N., Nerita, S.,
Rurisman, R., Gistituati, N.,
& Rusdinal, R. (2024).
Analisis Kebijakan
Pendidikan Terkait
Implementasi Pendidikan
Vokasi Dan Pelatihan
Vokasi. <i>Naturalistic: Jurnal
Kajian Dan Penelitian
Pendidikan Dan
Pembelajaran</i>, 8(2), 322–
338.
https://doi.org/10.35568/naturalistic.v8i2.3559</p> | Kualitatif | <p>Hasil dari penelitian ini adalah 1) Tujuan utama dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 2) Perumusan tujuan dan sasaran telah dirumuskan dengan jelas dan konsisten. 3) Perumusan kebijakan Implementasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah didasarkan pada landasan teori yang kuat dan terpercaya diantaranya Teori Kecocokan Pekerjaan dan Pendidikan, Teori Human Capital, Teori Pilihan Rasional, Teori Kompetensi, dan teori kejuruan 4) Proses Implementasi sudah didasarkan kepada Dasar Hukum yang jelas 5) Komitmen dan Keahlian dari Para Pelakasana Kebijakan sudah baik tetapi perlu ditingkatkan lagi 6) Implementasi Pendidikan vokasi dan</p> |

pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan dari stekkolder yaitu mitra industri mencapai skor 3,46 dari skala 4, 7) Implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan SMK Pusat Keunggulan sebanyak 373 SMK dari sekitar 1.400 dari SMK Pusat Keunggulan telah mengimplementasikan Skema Pemदान Dukungan dengan melibatkan 349 industri mitra. 8) Prioritas penggunaan sumber daya yang terbatas, memfasilitasi inovasi teknologi, dan mendukung peningkatan industri dalam bentuk suatu kebijakan.

Dengan adanya tuntutan dunia pendidikan yang semakin maju dan berkembang dengan adanya kemajuan teknologi yang terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia untuk dapat meningkatkan kualitas Pendidikan Vokasi dan pelatihan Vokasi yang lebih baik. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut diatas, artikel ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Perpres nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya.

METODE

Analisis kebijakan ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan banyak informasi dengan mengumpulkan banyak data dari berbagai jurnal sebelumnya. Proses telaah ini merupakan riset yang didalamnya mengidentifikasi, menilai serta menafsirkan dari bukti yang tersedia untuk menemukan suatu jawaban dari pertanyaan penelitian yang lebih spesifik (Kitchenham&Charters, 2007). Proses telaah dilakukan dengan sistematis. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah terkait Implementasi Perpres Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan banyak informasi dengan cara mengumpulkan data dari berbagai jurnal terdahulu seperti jurnal nasional dan jurnal internasional. Proses review dilakukan secara berkala dan sistematis. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Perpres Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Terdapat lima langkah SLR meliputi: formulasi kasus, proses pencarian (pengumpulan jurnal tentang Perpres Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi), penilaian kualitas, analisis data, membuat simpulan dari semua jurnal dan terakhir memberikan umpan balik tentang simpulan itu sendiri untuk membuat review jurnal sistematis terkait Perpres Nomor 68 tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Adapun tahapan dari model penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tahap Metode Systematic Literature Review (SLR)

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwasanya ada lima tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penggunaan metode *Sytematic Literature Review (SLR)* yakni peneliti memformulasikan kasus yang akan dianalisis. Setelah itu penulis mencari beberapa referensi berupa artikel jurnal sebanyak-banyaknya melalui mesin pencarian *google* dan aplikasi *publish and perish*. Setelah itu peneliti memproses pencarian artikel jurnal yang relefan dengan materi yang akan dianalisis. Pada tahapan selanjutnya dilakukan penyeleksian berdasarkan kualitas artikel yang akan dianalisis. Pada tahap lima dari metode ini adalah peeliti menyimpulkan terkait temuan dari beberapa artikel yang telah dipilih sebagai objek penelitian. Diakhir tahapan ini, peneliti menganalisis secara mendalam beberapa data yang telah diperoleh dari literatur yang ada untuk menemukan jawaban dari proses analisis terkait Implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Urgensi

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 ini memiliki urgensi yang tinggi dalam membangun akses lembaga pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja baik di kelas lokal, nasional bahkan internasional; mendorong spesifikasi lembaga pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Melakukan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki peran dalam meningkatkan kompetensi calon pekerja khususnya lulusan SMK dan masyarakat secara umum.

Hal ini tercermin dari bunyi pada pasal 2 yang merupakan tujuan dari aturan ini dibuat yakni diantaranya adalah (Perpres, 2022): a) meningkatkan akses, mutu dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; b) mendorong Pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan

Vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja; c) melakukan penguatan sinergi antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia atau tenaga kerja Indonesia; d) membekali sumber daya manusia tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan atau berwirausaha dan mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Penguatan Tata Kelola

Dalam menjalankan Perpres ini tentunya pemerintah tidak bisa secara langsung bekerja sendiri. Akan tetapi membutuhkan peran serta dari stakeholder dengan cara melakukan koordinasi antar berbagai pihak utamanya dengan koordinasi antar Kementerian bersama dengan Lembaga terkait dalam penyelenggaraan sekolah vokasi. Adapun kementerian yang terkait dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 ini tidak hanya Kementerian Pendidikan akan tetapi ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI), dan Kementerian Keuangan. Koordinasi antar Kementerian telah berdiskusi dan berkolaborasi sehingga teretuslah suatu ide yang apad akhirnya melahirkan Perpres nomor 68 Tahun 2022 terkait revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ini.

Selain pihak kementerian terkait, koordinasi juga dilakukan dengan stakeholder yakni Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan salah satu kunci dari Implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Dengan Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah membentuk tim TKDV untuk memudahkan koordinasi antar tim di daerah-daerah terkait Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di daerah. Serta merupakan salah satu upaya untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045 (Saufi, 2023). Hal ini sejalan dengan Asdep Dikvoti, Ahmad Saufi (KEMENKO_PMK, Sosialisasi Awal Pembentukan TKDV di 5 Kab/Kota, 2023) pada saat Sosialisasi Awal Pembentukan TKDV di 5 Kab/Kota yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas-Kementerian Ketenagakerjaan RI menyatakan “kunci implementasi Perpres 68 tahun 2022 adalah inisiatif dari pemerintah daerah dalam membentuk TKDV”. Penyampaian lebih lanjut adalah bahwa dalam rangka membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, ditetapkan Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Dalam rangka tindak lanjut Perpres No.68 Tahun 2022 KEMENKO PMK telah mengirimkan surat kepada seluruh Gubernur, Bupati dan walikota di seluruh Indonesia pada tanggal 14 April 2023 melalui TKDV Adapun tugas TKDV meliputi (KEMENKO_PMK, 2023): 1) menyusun perencanaan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem

informasi pasar kerja di daerah masing-masing; 2) menyusun perencanaan strategis terkait RPVPV; 3) melakukan penyalarsan Pendidikan dan pelatihan vokasi dengan DUDIKA; 4) menyediakan dukungan pendanaan; 5) menyediakan ketersediaan pendidik dan instruktur, serta melaporkan penyelenggaraan Revitalisasi vokasi di daerah kepada TKNV.

Implementasi di Lapangan

Implementasi Perpres Nomor 68 tentang Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi merupakan suatu Solusi yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi yang baik, produktifitas yang tinggi serta mampu bersaing. Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional yakni (UU, 2003) ingin mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Perumusan tujuan dan sasaran telah dirumuskan dengan jelas dan konsisten dan telah sesuai dengan teori kecocokan pekerjaan dan Pendidikan, Teori Human Capital, Teori Pilihan Rasional, Teori Kompetensi, dan teori kejuruan. Perpres ini memiliki Dasar Hukum yang jelas. Dalam implementasinya, komitmen dan keahlian dari para pelakasa kebijakan sudah baik akan tetapi perlu adanya peningkatan. Adapun pihak-pihak yang mendukung dalam Implementasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi antara lain yakni stakeholder yaitu mitra SMK Pusat Keunggulan (SMK PK); SMK Skema Pemandan Dukungan dengan industri mitra dan berbagai pihak lainnya. Adapun prioritas dari implementasi ini adalah penggunaan sumber daya yang terbatas, memfasilitasi inovasi teknologi, dan mendukung peningkatan industri dalam bentuk suatu kebijakan.

Pada dasarnya setiap kebijakan dibuat untuk menata dan mengatur suatu aspek tertentu untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Begitu pula dengan kebijakan Perpres nomor 68 tahun 2022 terkait revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Tujuan utama dari perpres ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui revitalisasi pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Fokus utama dari Perpres ini adalah menciptakan lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten, produktif dan siap menghadapi tantangan perubahan zaman yang ada pada dunia kerja baik di tingkat sekolah maupun pada ingkat perguruan tinggi. Perpres ini melibatkan berbagai pihak dan mencakup beberapa aspek yang mana diantaranya meliputi: 1) Lembaga Pendidikan Vokasi; 2) Stakeholder; 3) Masyarakat pengguna jasa Pendidikan Vokasi; dan 4) DUDIKA.

Sistem Dukungan

Dalam implementasi Perpres nomor 68 Tahun 2022 pemerintah memberikan dukungan yang luar biasa baik kepada pihak penyelenggara Pendidikan Vokasi yakni sekolah hingga perguruan tinggi dan pihak Industri mitra Pendidikan Vokasi. Sistem dukungan merupakan bagian integral dari

lingkungan social dalam mencapai tahap-tahap perkembangan tertentu. Apabila dukungan dari stakeholder dan pihak-pihak terkait baik maka kemiteraaran yang terjalin atas dasar kerjasama juga akan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem dukungan mampu menentukan arah kesuksesan bisnis.

Sistem dukungan diberikan sebagai upaya untuk mensukseskan implementasi Perpres dilapangan agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun sistem dukungan yang diberikan diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Beasiswa: Pemerintah menyediakan beasiswa Pendidikan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan vokasi. Pelatihan ini diberikan kepada masyarakat secara luas untuk dapat melanjutkan Pendidikan Vokasi. Sebagai contoh Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI Kemdikbudristek yang diperuntukkan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di SMK serta siswa SMK yang berprestasi yang ingin melanjutkan studi dengan mengambil program keahlian yang diharapkan dapat mendukung kemajuan dan kualitas pendidikan yang ada pada Lembaga Pendidikan Vokasi; 2) Pemberian *In Kind* dan *In Cash* oleh Pemerintah. *In Kind* dan *In Cash* yang diberikan kepada Industri yang bersedia bekerjasama atau dengan kata lain bermitra dengan SMK. Hal ini sangat menguntungkan bagi dua belah pihak yakni SMK dan industri mitra. Adanya investasi industri baik secara *In Kind* maupun *In Cash* pada program SMK PK SPD merupakan langkah yang cukup strategis untuk menciptakan ekosistem kemiteraaran vokasi yang terukur dan berkelanjutan (Kemdikbud, 2023); 3) Pelatihan *Upskilling* dan *Reskilling* bagi Guru SMK. Pemerintah memberikan peluang kepada Guru SMK untuk meningkatkan kompetensi mereka dengan memberikan pelatihan dengan adanya pelatihan *upskilling* dan *reskilling* guru diharapkan para guru skm dapat mengupgrade keilmuan mereka dengan menyesuaikan kurikulum yang ada pada DUDIKA sehingga pembelajaran di SMK dapat efektif dan selaras dengan kebutuhan yang ada pada DUDIKA saat ini.

Peran Disnaker dan Pelatihan Vokasi

Disnakertrans dan Pelatihan Vokasi menjalin kemiteraaran dengan BKK SMK dalam revitalisasi Pendidikan Vokasi. Kemiteraaran keduanya dapat memberikan kemanfaatan serta dapat menciptakan hubungan baik diantara keduanya dengan berbagai pihak yang berkepentingan utamanya SMK. Selain itu kemiteraaran dapat menciptakahn hubungan pembelajaran yang mencakup Tingkat kepercayaan timbal balik yang lebih tinggi dari kerjasama diantara mitra. (R.Cross&L.Baird, 2000) berpendapat bahwa melalui berbagi pengetahuan dan kolaborasi, dalam pemecahan masalah, jaringan hubungan terbentuk dan 'komunitas praktik' berkembang. Namun, untuk menuai manfaat yang diperoleh komunitas ini dalam bentuk berbagi pengetahuan

Disnakertrans dan Pelatihan Vokasi menjalin kemiteraaran dengan BKK SMK dalam revitalisasi Pendidikan Vokasi. Dengan adanya kemiteraaran ini diharapkan mampu menjadi motor

penggerak kerjasama antara DUDIKA dengan penyelenggara Pendidikan Vokasi dalam hal ini SMK dan Perguruan Tinggi Vokasi. Manfaat bermitra dan menciptakan hubungan pembelajaran sejati mencakup tingkat kepercayaan timbal balik yang lebih tinggi, tingkat kerja sama dan pemahaman yang lebih besar antara mitra, komunikasi yang lebih baik dan berbagi (Gulati, Nohria & Zaheer 2000). Melalui berbagi pengetahuan dan kolaborasi, dalam pemecahan masalah, jaringan hubungan terbentuk dan 'komunitas praktik' berkembang (Charp 2001; Cross & Baird 2000). Namun, untuk menuai manfaat yang diperoleh komunitas ini dalam bentuk berbagi pengetahuan, Cross dan Baird (2000) menekankan bahwa organisasi perlu menginvestasikan sejumlah besar waktu dan energi untuk mengembangkan tingkat kepercayaan yang kuat dalam kemitraan, baik ini melibatkan mitra internal maupun eksternal organisasi. Dalam organisasi yang paling sukses saat ini, jaringan, tim, dan kemitraan menggantikan tugas-tugas yang ditetapkan secara ketat, sistem kontrol, dan struktur yang kaku.

Melalui tugas pokok yang dimiliki yakni sebagai pelaksana bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas dan sebagai delegasi dari Pemerintahan Provinsi. Adapun tugas Disnakertrans secara umum adalah melaksanakan pembinaan dan perijinan/pelayanan dibidang penyaluran dan penempatan tenaga kerja, pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pelaksanaan pembinaan dengan Industrial dan kesejahteraan pekerja.

Pada kesempatan yang lalu Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Madiun Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan LPTK dan pihak terkait yakni dengan seluruh BKK di Daerah Madiun untuk memfasilitasi para lulusan SMK dengan menghadirkan pihak pemilik aplikasi yang didalamnya terdapat *job fair*. Dengan menggunakan aplikasi tersebut para pencari kerja dapat secara langsung mencari dan menemukan perusahaan atau posisi pekerjaan yang diinginkan. Keiatan tersebut sangat positif mengingat para pencari kerja khususnya lulusan SMK bisa dapat mencari kerja dengan membuka sebuah aplikasi yang didalamnya terdapat pilihan lowongan kerja dengan berbagai posisi yang bervariasi yang ditawarkan oleh beberapa instansi baik dari swasta maupun instansi pemerintah. Dinas Tenaga Kerja dan pelatihan berupaya semaksimal mungkin menjalankan amanah dari undang-undang terkait tugasnya dalam memberikan informasi dan pelatihan bagi masyarakat pencari kerja. Hal tersebut diatas sejalan dengan (UUD, 1945) undang-undang dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Tantangan dalam Implementasi

Dalam sebuah implementasi kebijakan tentunya tidak seluruhnya dapat berjalan mulus, akan tetapi ada beberapa kendala yang sering kali dihadapi di lapangan. Adapun tantangan yang di hadapi

dalam implementasi Perpres nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan pelatihan Vokasi antara lain adalah: 1) kurangnya koordinasi antar Kementerian terkait, Lembaga Pusat dan Daerah, stakeholder dan lembaga lain sebagai pelaksana untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak terkait yang dapat mendukung peningkatan kerjasama antara lembaga Pendidikan dengan DUDIKA; 2) Belum optimalnya pembentukan dan kinerja Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) sehingga implementasi Perpres belum maksimal; 3) keterbatasan sumber daya yang siap untuk dipekerjakan karena beberapa faktor diantaranya adalah restu dari orang tua yang tidak mengizinkan bekerja jauh dari rumah, kesenjangan antar kurikulum Pendidikan Vokasi dengan kebutuhan dunia kerja yang belum sepenuhnya terakomodir dengan baik; 4) kurangnya tenaga pendidik dan pelatih vokasi yang berkualitas dan kompeten; 5) kurangnya intensif bagi tenaga pendidik pada daerah-daerah tertentu dan pelatih serta 6) keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa daerah sehingga menyebabkan tingkat keterserapan lulusan Pendidikan Vokasi belum dapat maksimal di beberapa daerah di Indonesia. Maka,

PEMBAHASAN

Urgensi

Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknis adalah penyediaan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknis dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk karier yang didasarkan pada kegiatan manual dan praktis, pemahaman tentang hukum sains dan teknologi sebagaimana diterapkan pada desain dan produksi modern (Osuala, 2006). Sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi adalah dengan cara menerbitkan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terkait Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten produktif dan mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan dimasa depan demi mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Avana, 2024) bahwa tujuan utama dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Adapun fokus dari Perpres ini adalah untuk meningkatkan akses, mutu serta relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.

Usaha Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melalui program kemiteraan SMK dengan DUDIKA sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan dalam kemiteraan antara keduanya peserta didik dibekali dengan keterampilan industri untuk

mengenal lebih dekat proses kerja di dunia industri yang sesungguhnya berdasarkan kebijakan dari sekolah dan industri juga pemerintah melalui penyelarasan kurikulum SMK dengan DUDIKA. Hal ini sejalan dengan (V. H. Dang, 2016) bahwa program kemitraan SMK dengan DUDI dengan konsep 5C memberikan bekal keterampilan industri bagi siswa untuk mengenal lebih dekat proses kerja di dunia industri berdasarkan kebijakan dari sekolah, pemerintah, dan industri. Indikator pengalaman kerja secara konsep dan praktik telah diberikan di SMK setelah industri diterapkan dengan keterampilan kolaboratif di industri. Pernyataan tersebut memiliki kesamaan dengan pernyataan dari (Triyono MB, 2021) bahwa Pengembangan SMK dituntut harus fleksibel dan responsif dalam menghadapi tuntutan dan perubahan masa depan khususnya pada RI 4.0. SMK diharapkan dapat mendorong lulusan SMK yang adaptif terhadap perubahan teknologi di industri dan dunia kerja. Aspek penting yang dinilai sangat kritis untuk menilai kesiapan SMK dalam menghadapi RI 4.0 antarlain dibutuhkan kesesuaian antara bidang keahlian dan program keahlianyang ada di SMK. dengan konteks kebutuhan kerja RI 4.0. Bidang keahlian dan program keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan pengembangan tenaga kerja merupakan dasar untuk menentukan standar okupasi dan selanjutnya sebagai bahan untuk pengembangan atau penyelarasan kurikulum. Melalui kurikulum tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran SMK sebagai lembaga pencetak tenaga kerja terampil. Peran SMK sebagai Lembaga Pendidikan yang menyiapkan SDM terampil atau tenaga kerja terampil akan terancam gagal apabila penyelenggaraan bidang keahlian dan program keahlian di SMK tidak relevan dengan kebutuhan DUDIKA. Berdasarkan hal tersebut, upaya penyesuaian bidang dan program keahlian SMK dengan perkembangan teknologi RI 4.0 dinilai sangat penting dan strategis dan menjadi dasar kajian Redesain Bidang Keahlian dan Program Keahlian SMK di Era Revolusi Industri 4.0. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Nurlev A., 2024) yang menyatakan bahwa perumusan kebijakan Implementasi Perpres Nomor 68 tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi telah didasarkan pada landasan teori yang kuat dan terpercaya diataranya Teori Kecocokan Pekerjaan dan Pendidikan, Teori Human Capital, Teori Pilihan Rasional, Teori Kompetensi, dan teori kejuruan.

Implementasi Lapangan

Implementasi Perpres Nomor 68 tentang Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi merupakan suatu Solusi yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi yang baik, produktifitas yang tinggi serta mampu bersaing. Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional yakni (UU, 2003) ingin mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Perumusan tujuan dan sasaran telah dirumuskan dengan jelas dan konsisten dan telah sesuai dengan teori kecocokan

pekerjaan 3) Perumusan kebijakan Implementasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah didasarkan pada landasan teori yang kuat dan terpercaya di antaranya Teori Kecocokan Pekerjaan dan Pendidikan, Teori Human Capital, Teori Pilihan Rasional, Teori Kompetensi, dan teori kejuruan 4) Proses Implementasi sudah didasarkan kepada Dasar Hukum yang jelas 5) Komitmen dan Keahlian dari Para Pelaksana Kebijakan sudah baik tetapi perlu ditingkatkan lagi 6) Implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan dari stekkolder yaitu mitra industrimencapai skor 3,46 dari skala 4, 7) Implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan SMK Pusat Keunggulan sebanyak 373 SMK dari sekitar 1.400 dari SMK Pusat Keunggulan telah mengimplementasikan Skema Pemदानan Dukungan dengan melibatkan 349 industri mitra. 8) Prioritas penggunaan sumber daya yang terbatas, memfasilitasi inovasi teknologi, dan mendukung peningkatan industri dalam bentuk suatu kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres nomor 68 tahun 2022 sudah berjalan dengan baik di masyarakat. Akan tetapi di beberapa daerah adanya sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti kurangnya koordinasi antar kementerian terkait, lembaga pusat dan daerah, stakeholder dan lembaga sebagai pelaksana untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak terkait yang dapat mendukung peningkatan kerjasama antara lembaga Pendidikan dengan DUDIKA; Belum optimalnya pembentukan dan kinerja Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) keterbatasan sumber daya yang siap untuk dipekerjakan, kesenjangan antar kurikulum Pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja; kurangnya tenaga pendidik dan pelatih vokasi yang berkualitas dan kompeten; kurangnya intensif bagi tenaga pendidik dan pelatih serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa daerah sehingga menyebabkan tingkat keterserapan lulusan Pendidikan Vokasi belum dapat maksimal di beberapa daerah di Indonesia.

Hal tersebut diatas sejalan dengan (Siregar, 2023) bahwa berdasarkan Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) dari segi komunikasi, disposisi, struktur birokrasi sudah berjalan sesuai teori yang ada, meskipun masih terdapat kendala. Sehingga penelitian ini menyarankan perlunya penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga peningkatan kualitas pendidikan, pendanaan serta pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan pasar kerja yakni seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koordinasi PMK, Lembaga Pelatihan Vokasi dan Pemerintahan Daerah setempat serta TKNV, TKDV, DISNAKER, BKK Provinsi, BKK SMK, dan lain sebagainya. Dengan adanya kolaborasi industri dengan Pendidikan Vokasi yakni SMK merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Vokasi dan meningkatkan kualitas lulusan SMK agar siap bersaing dalam menghadapi tantangan zaman yang ada di Dunia Kerja. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian dari (Nurlev

A., 2024) terkait implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022 meliputi: 1) Tujuan utama dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 2) Perumusan tujuan dan sasaran telah dirumuskan dengan jelas dan konsisten. 3) Perumusan kebijakan Implementasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah didasarkan pada landasan teori yang kuat dan terpercaya di antaranya Teori Kecocokan Pekerjaan dan Pendidikan, Teori Human Capital, Teori Pilihan Rasional, Teori Kompetensi, dan teori kejuruan 4) Proses Implementasi sudah didasarkan kepada Dasar Hukum yang jelas 5) Komitmen dan Keahlian dari Para Pelaksana Kebijakan sudah baik tetapi perlu ditingkatkan lagi 6) Implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan dari stekkolder yaitu mitra industri mencapai skor 3,46 dari skala 4, 7) Implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan SMK Pusat Keunggulan sebanyak 373 SMK dari sekitar 1.400 dari SMK Pusat Keunggulan telah mengimplementasikan Skema Pendanaan Dukungan dengan melibatkan 349 industri mitra. 8) Prioritas penggunaan sumber daya yang terbatas, memfasilitasi inovasi teknologi, dan mendukung peningkatan industri dalam bentuk suatu kebijakan

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh hasil proceeding dari (Purnamawati, 2018) yang menunjukkan bahwa implementasi Perpres Nomor 68 tahun 2022 sudah berjalan dengan baik di masyarakat. Akan tetapi di beberapa daerah adanya sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti kurangnya koordinasi antar Kementerian, lembaga pusat dan daerah, stakeholder dan lembaga sebagai pelaksana untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak terkait yang dapat mendukung peningkatan kerjasama antara lembaga Pendidikan dengan DUDIKA; Belum optimalnya pembentukan dan kinerja Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) keterbatasan sumber daya yang siap untuk dipekerjakan, kesenjangan antar kurikulum Pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja; kurangnya tenaga pendidik dan pelatih vokasi yang berkualitas dan kompeten; kurangnya intensif bagi tenaga pendidik dan pelatih serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa daerah sehingga menyebabkan tingkat keterserapan lulusan Pendidikan Vokasi belum dapat maksimal di beberapa daerah di Indonesia. Disamping itu penelitian ini menyarankan perlunya penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga, peningkatan kualitas pendanaan, serta pengebangan kurikulum yang lebih relevan dengan pasar kerja.

Sistem Dukungan

Sistem dukungan merupakan bagian integral dari lingkungan social dalam mencapai tahap-tahap perkembangan tertentu. Apabila dukungan dari stakeholder dan pihak-pihak terkait baik maka kemiteraan yang terjalin atas dasar kerjasama juga akan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem

dukungan mampu menentukan arah kesuksesan bisnis. Hal ini sejalan dengan (Nurlev A., 2024) bahwa dukungan stakeholder dari suatu perusahaan yang bisa menentukan arah kesuksesan bisnis. Jika hubungan antar stakeholder itu baik, maka akan besar kemungkinan besar bisnis tersebut juga dapat berjalan dengan lancar dan sukses dengan baik.

Adapun sistem dukungan dari pemerintah terhadap implementasi Perpres Nomor 68 tahun 2022 yang ada dalam kemiteraan SMK dengan DUDI antara lain adalah 1) Beasiswa: Pemerintah menyediakan beasiswa pendidikan untuk mengikuti Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; Pemberian *In Kind* dan *In Cash* oleh Pemerintah dan Pelatihan *Upskilling* dan *Reskilling* bagi Guru SMK. Hal ini sejalan dengan pendapat (Kemdikbud, 2023) bahwa adanya investasi industri baik secara *In Kind* maupun *In Cash* pada program SMK PK SPD merupakan langkah yang cukup strategis untuk menciptakan ekosistem kemiteraan vokasi yang terukur dan berkelanjutan.

Peran Disnaker dan Pelatihan Vokasi

Disnakertrans dan Pelatihan Vokasi menjalin kemiteraan dengan BKK SMK dalam revitalisasi Pendidikan Vokasi. Kemiteraan keduanya dapat memberikan kemanfaatan serta dapat menciptakan hubungan baik diantara keduanya dengan berbagai pihak yang berkepentingan utamanya SMK. Selain itu kemiteraan dapat menciptakan hubungan pembelajaran yang mencakup Tingkat kepercayaan timbal balik yang lebih tinggi dari kerjasama diantara mitra. Sejalan dengan (Gulati, 2000) bahwa manfaat bermitra dan menciptakan hubungan pembelajaran sejati mencakup tingkat kepercayaan timbal balik yang lebih tinggi, tingkat kerjasama dan pemahaman yang lebih besar antara mitra, komunikasi yang lebih baik dan berbagi. Dengan adanya kemiteraan ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kerjasama antara DUDIKA dengan penyelenggara Pendidikan Vokasi dalam hal ini SMK dan Perguruan Tinggi Vokasi. Menurut (R.Cross&L.Baird, 2000) melalui berbagi pengetahuan dan kolaborasi, dalam pemecahan masalah, jaringan hubungan terbentuk dan 'komunitas praktik' berkembang. Namun, untuk menuai manfaat yang diperoleh komunitas ini dalam bentuk berbagi pengetahuan, (R.Cross&L.Baird, 2000) menekankan bahwa organisasi perlu menginvestasikan sejumlah besar waktu dan energi untuk mengembangkan tingkat kepercayaan yang kuat dalam kemitraan, baik ini melibatkan mitra internal maupun eksternal organisasi. Dalam organisasi yang paling sukses saat ini, jaringan, tim, dan kemitraan menggantikan tugas-tugas yang ditetapkan secara ketat, sistem kontrol, dan struktur yang kaku.

Pada kesempatan yang lalu Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Madiun Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan LPTK dan pihak terkait yakni dengan seluruh BKK di Daerah Madiun untuk memfasilitasi para lulusan SMK dengan menghadirkan pihak pemilik aplikasi yang didalamnya terdapat *job fair*. Dengan menggunakan aplikasi tersebut para pencari kerja dapat secara langsung mencari dan menemukan perusahaan atau posisi pekerjaan yang diinginkan. Keiatan tersebut sangat

positif mengingat para pencari kerja khususnya lulusan SMK bisa dapat mencari kerja dengan membuka sebuah aplikasi yang didalamnya terdapat pilihan lowongan kerja dengan berbagai posisi yang bervariasi yang ditawarkan oleh beberapa instansi baik dari swasta maupun instansi pemerintah. Dinas Tenaga Kerja dan pelatihan berupaya semaksimal mungkin menjalankan amanah dari undang-undang terkait tugasnya dalam memberikan informasi dan pelatihan bagi masyarakat pencari kerja. Hal tersebut diatas sejalan dengan (UUD, 1945) undang-undang dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Tantangan dalam Implementasi Lapangan

Dalam sebuah implementasi kebijakan tentunya tidak seluruhnya dapat berjalan mulus, akan tetapi ada beberapa kendala yang sering kali dihadapi di lapangan. Adapun tantangan yang di hadapi dalam implementasi Perpres nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan pelatihan Vokasi antara lain adalah: 1) kurangnya koordinasi antar Kementerian, lembaga pusat dan daerah, stakeholder dan lembaga sebagai pelaksana untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak terkait yang dapat mendukung peningkatan kerjasama antara lembaga Pendidikan dengan DUDIKA; 2) Belum optimalnya pembentukan dan kinerja Tim Koordinasi Daerah Vokasi sehingga implementasi Perpres belum maksimal; 3) keterbatasan sumberdaya yang siap untuk dipekerjakan karena beberapa faktor diantaranya adalah restu dari orang tua yang tidak mengizinkan bekerja jauh dari rumah, kesenjangan antar kurikulum Pendidikan Vokasi dengan kebutuhan dunia kerja yang belum sepenuhnya terakomodir dengan baik; 4) kurangnya tenaga pendidik dan pelatih vokasi yang berkualitas dan kompeten; 5) kurangnya intensif bagi tenaga pendidik pada daerah-daerah tertentu dan pelatih serta 6) keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa daerah sehingga menyebabkan tingkat keterserapan lulusan Pendidikan Vokasi belum dapat maksimal di beberapa daerah di Indonesia. Adapun tantangan yang dijelaskan sejalan dengan hasil penelitian dari (Purnamawati, 2018) yakni Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres nomor 68 tahun 2022 sudah berjalan dengan baik di masyarakat. Akan tetapi di beberapa daerah adanya sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti kurangnya koordinasi antar Kementerian, lembaga pusat dan daerah, stakeholder dan lembaga sebagai pelaksana untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak terkait yang dapat mendukung peningkatan kerjasama antara lembaga Pendidikan dengan DUDIKA; Belum optimalnya pembentukan dan kinerja Tim Koordinasi Daerah Vokasi keterbatasan sumber daya yang siap untuk dipekerjakan, kesenjangan antar kurikulum Pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja; kurangnya tenaga pendidik dan pelatih vokasi yang berkualitas dan kompeten; kurangnya intensif bagi tenaga pendidik dan pelatih serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa daerah sehingga menyebabkan tingkat keterserapan lulusan Pendidikan Vokasi belum dapat maksimal di beberapa daerah di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pada Perpres Nomor 68 tahun 2022 secara garis besar memiliki tujuan untuk memperkuat kualitas Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia. Tujuan utama dari Perpres ini adalah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, produktif, dan berdaya saing untuk menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Dengan adanya Revitalisasi Pendidikan Vokasi pada Perpres ini mendorong adanya perubahan besar dalam sistem Pendidikan vokasi, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran hingga kerjasama Lembaga Pendidikan dengan dunia industri. Pada kebutuhan dunia kerja materi pembelajaran yang ada pada Pendidikan vokasi dapat diselaraskan sehingga lulusannya akan banyak terserap oleh DUDIKA dan dapat berkontribusi dalam penguatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu lulusan dari Pendidikan vokasi mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022 sudah berjalan dengan baik di masyarakat. Akan tetapi masih terdapat tantangan di beberapa daerah dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti: 1) kurangnya koordinasi antar Kementerian terkait, Lembaga Pusat dan Daerah, stakeholder dan lembaga lain sebagai pelaksana dalam memperkuat kolaborasi dengan pihak terkait yang mendukung kerjasama antara lembaga Pendidikan dengan DUDIKA; 2) Belum optimalnya pembentukan dan kinerja Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) sehingga implementasi Perpres belum maksimal; 3) keterbatasan sumber daya yang siap untuk dipekerjakan karena beberapa faktor diantaranya adalah restu dari orang tua yang tidak mengizinkan bekerja jauh dari rumah, 4) kesenjangan antar kurikulum Pendidikan Vokasi dengan kebutuhan dunia; 5) kurangnya tenaga pendidik dan pelatih vokasi yang berkualitas dan kompeten; 6) kurangnya intensif bagi tenaga pendidik dan pelatih pada daerah-daerah tertentu; 7) keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa daerah sehingga menyebabkan tingkat keterserapan lulusan Pendidikan Vokasi belum dapat maksimal di beberapa daerah di Indonesia. Perpres Nomor 68 Tahun 2022 merupakan salah satu langkah maju dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan adanya kolaborasi dan kemitraan yang saling menguntungkan antara Dunia Pendidikan dan DUDIKA sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

SARAN

Secara garis besar aspek dan butir pasal yang terkandung dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 ini sudah bagus dan sangat sistematis. Namun perlu pendalaman serta pengembangan agar aturan ini bisa sejalan dengan tujuan pendidikan Nasional yang mengutamakan kompetensi siswa sebagai dasar pengembangan akhlak. DUDIKA sebagai ruang pengembangan kompetensi siswa yang telah di setel sedemikian rupa melalui penyesuaian Kurikulum SMK dengan DUDI untuk memperoleh SDM yang unggul berkompeten dan berdaya saing tinggi. Meskipun demikian kompetensi siswa tidak perlu dipaksakan untuk bekerja pada DUDIKA tertentu. Hal ini karena kompetensi merupakan pertumbuhan bakat yang dimiliki anak secara alami, yang kemudian mendapat rangsangan dari luar pendidikan yang sesuai untuk berkembang dan bisa membantu memecahkan masalah baik melalui DUDIKA. Selain itu bagi pemerintah hendaknya mengirimkan delegasi untuk dapat melakukan peninjauan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi riil penyaluran alumni Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi apakah sudah tepat sasaran atau belum. Karena di lapangan banyak terjadi ketidaksesuaian pekerjaan dengan jurusan yang mereka ambil. Maka alangkah baiknya pemerintah melalui kewenangannya dapat memberikan Solusi terbaik bagi permasalahan tersebut di lapangan. Sehingga lulusan SMK dapat terserap seluruhnya sesuai dengan bakat minat dan kompetensi masing-masing. Selain itu hendaknya Pemerintah seharusnya menggandeng dua Kementerian yang terkait yakni Kementerian Pendidikan dan Kementerian tenaga kerja dalam rangka mengurangi penumpukan jumlah pengangguran lulusan Pendidikan Vokasi. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam pada (Perpres, 2022) terkait manajemen kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja sebagai pertimbangan dalam Implementasi Perpres No. 68 Tahun 2022 dalam rangka meningkatkan keterserapan lulusan sekolah dan Perguruan Tinggi Vokasi yang ada di Indonesia guna melengkapi hasil temuan penelitian yang telah dilaksanakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afwan, M. (2013). Leadership on technical and vocational education in community college [Versi elektronik]. *Journal of Education and Practice*, 4 (21), 21-23.
- American Institutes for Research in Behavioral Science." (1980). In *Educational Training Components (ETC)*, Madison, Wis.: The Vocational Snidy Center. Anjasari, Pita. *Manajemen Lingkungan dan Stakeholder Pendidikan*, academia edu, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Ashmore, M Catherine, and Geannina Guzman. (1988). *Entrepreneurship Program Database*. Columbus: The Ohio State University, National Center for Research in Vocational Education.
- Bidandari, A. & Hariyati N. (2023). Implementation of Clinical Supervision to Improve the Quality of Teacher Performance in the Learning and Teaching Process. *International Journal of Emerging Research and Review (IJOERAR)*. 1(4): DOI: <https://doi.org/10.56707/ijerar.vli4.55>.

- B. K. Googins and S. A. Rochlin,(2000). "Creating the partnership society: understanding the rhetoric and reality of cross- sectoral partnerships," *Bus. Soc. Rev.*, vol. 105, no. 1, pp. 127–144.
- Cross & Baird.(2000). *Technology is not Enough: Improving Pervormance by Building Organizational Memory*. Scholarly Journal. Cambridge. 41(3),p.69-78. https://www.researchgate.net/publication/291769314_Technology_is_not_enough_Improvin_g_performance_by_building_organizational_memory
- D. Newhouse and D. Suryadarma, (2009). *The value of vocational education: high school type and labor market outcomes in Indonesia*. The World Bank,
- Edmon, A., & Oluyi, A. (2014). Re-engineering technical vocational education and training toward safety practice skill needs of sawmill workers against workplace hazards in Nigeria [Versi elektronik]. *Journal of Education and Practice*, 5 (7), 150-157
- Erlinawati, E. (2020). *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI SMK DALAM BIDANG PENGUATAN KERJASAMA INDUSTRI DI SMK MUHAMMADIYAH 1 KOTA MALANG*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- FAISAL, A.F. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN SEKOLAH VOKASI DI KOTA MAKASSAR*. TESIS. Universitas Hasanuddin.
- Gulati, Nohria & Zaheer (2000). *Strategic Network*. *Strategic Manajement Journal*. Volume 21(3). P.203-215.[https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(200003\)21:3<203::AID-SMJ102>3.0.CO;2-K](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(200003)21:3<203::AID-SMJ102>3.0.CO;2-K)
- Kemdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. (2020) *Program Kerja Tahun 2021 (2021 work program)*. Available at: <https://vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/kemitraan-industri-dan-smk-semakin-kuat-ajuan-investasi-industri-capai-rp-2-3-triliun>
- Irwanto, I. (2020). 'Model pembelajaran pendidikan vokasional yang efektif di era revolusi industri 4.0', *TAMAN VOKASI*, 8(1). Available at: <https://doi.org/10.30738/jtv.v8i1.7265>.
- Kadir S, Nirwansyah, Ayasha Bachrul B (2016) *Technical and vocational education and training in Indonesia: challenges and opportunities for the future*. Available at: https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/case-studies/lkysppms_case_study__technical_and_vocational_education_and_training_in_indonesia.pdf?sfvrsn=e5c5960b_2. Accessed 1 Dec 2021
- Kemdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. (2020) *Program Kerja Tahun 2021 (2021 work program)*. Available at: <https://vokasi.kemdikbud.go.id/storage/document/September2020/N9Fo3EIt50SkUGEye2In.pdf>. Accessed 1 Dec 2021
- Kemdikbud, D. J. (2023). *KEMENTERIAN INDUSTRI DAN SMK SEMAKIN KUAT, AJUAN INVESTASI INDUSTRI CAPAI RP 2,3 TRILIUN*. Jakarta.
- KEMENKO_PMK. (2023). *Pentingnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pelaksanaan Perpres Nomor 68 Tahun 2022*. Jakarta.
- KEMENKO_PMK. (2023). *Sosialisasi Awal Pembentukan TKDV di 5 Kab/Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas-Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Kitchenham&Charters. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Department of Computer Science*.
- Margareta Wahyu Dwi Utari.2024. *Perencanaan kurikulum Penyelarasan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan di Wilayah 1 Jakarta Pusat*. Universitas Pendidikan Indonesia.repository.upi.edu.PPs upi,edu (UPI)
- M. Bruri Triyono & Didik Hariyanto . 2024. *Vocational Education and Training in Indonesia*. *International handbook on Education in Shoutest Asia*.Springer. First Online: 27 April 2024. pp 387–409. <https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-981-16-8136-3>.
- Moleong, L.J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurlev, A.(2024). 8589Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi. *urnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran*, 8 (2) (2024). p. 322-338. <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v8i1.3559>

- Osuala, E. C. (2006), Principles of Vocational and Technical Education Enugu: Cheston Books.
- PerPres. (2022). Perpres No. 68 Tahun 2022. Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelatihan Kerja
- Prosser, C.A., & Allen, C.R. (1952). Vocational Education in a Democracy. New York : CenturyRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
- Purnamawati, et, al.(2018). Developing a Partnership Model of Vocational High School with Business and Industrial World based Core Strategies.) Atlantis Press. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 227 1st international Convergence on Advance Multidisciplinary Research (ICAMR)
- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wardiman Joyonegoro, (1998). Pengembangan sumberdaya manusia melalui SMK. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset.
- Saufi, A. (2023). Pentingnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022. Jakarta: KEMENKO_PMK.
- Siregar, I.A. Hartono, B. & Isnaini. (2023). Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 Tahun 2022 di Dinas Pendidikan Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 2718 -2731. DOI: 10.34007/jehss.v5i4.1666
- SEA-VET (n.d.) Indonesia. Available at: <https://sea-vet.net/indonesia>. Accessed 30 Dec 2022
- Triyono MB, Pardjono, Sudira P, Mahfud T, Hariyanto D, Maryadi THT, Rabiman, Yuliana I (2020) Redesain Bidang Keahlian dan Program Keahlian pada Revolusi Industri 4.0. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Redesign of expertise and expertise programs in the industrial revolution 4.0. Directorate of Vocational High School Development). Available at: <http://smk.kemdikbud.go.id/konten/4809/redesain-bidang-keahlian-dan-program-keahlian-smk-pada-revolusi-industri-4.0>. Accessed 1 Dec 2021
- UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jakarta.
- V. H. Dang, (2016).“The Relationships Between the Vocational Education Training Providers and Enterprises: Theory and Practice,” *Int. J. Educ. Lit. Stud.*, vol. 4, no. 2, pp. 47–53, 2016.
- V. Callan and P. Ashworth, (2004). Working Together: Industry and VET Provider Training Partnerships. ERIC, 2004.